

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai organisasi regional, Uni Eropa sering diminta berperan sebagai mediator atau pihak ketiga dalam proses penyelesaian konflik internasional, mulai dari konflik etnis yang berujung pada krisis kemanusiaan, konflik separatisme yang berujung pada krisis politik yang menciptakan ketidakstabilan pada sebuah negara atau kawasan dan pada permasalahan konflik itu sendiri akan berujung pada krisis keamanan. Seperti apa yang tertuang dalam nota yang dikeluarkan oleh sekretariat umum dewan Uni Eropabahwa, Uni Eropa memiliki banyak tawaran sebagai aktor dalam mediasi. hal tersebut akan membawa nilai tambah dan titik masuk baru untuk inisiatif perdamaian melalui segi politik dan keuangan dengan melakukan pendekatan komprehensif dalam resolusi konflik, yang melibatkan seluruh instrumen termasuk masyarakat hal ini dikarenakan Uni Eropa berada dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkonflik.<sup>1</sup>

Konflik etnis dan separatisme adalah permasalahan yang sering terjadi pada negara-negara Uni Eropa akhir-akhir ini.seperti yang kita ketahui Menurut kamus besar Bahasa Indonesia separatis adalah orang atau golongan yang hendak memisahkan diri dari suatu persatuan,

---

<sup>1</sup> Council of the European Union, 2009, *Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities*, General Secretariat of the Council, Brussels, hal. 4

golongan bangsa untuk mendapatkan dukungan.<sup>2</sup>Dorongan yang dilakukan gerakan separatis untuk memisahkan diri biasanya terjadi karena kaum separatis merasa dirugikan dan terdapat kesenjangan didalamnya karena tidak mendapatkan kesesuaian dengan kepentingan yang mereka inginkan.Faktor etnis, agama, dan ekonomi merupakan faktor yang sering muncul dan menjadi dasar gerakan separatisme dimana ini tidak hanya terjadi di Uni Eropa saja namun juga pada gerakan separatis di regional lainnya. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada negara-negara dalam Uni Soviet dalam melakukan upaya pemisahan diri pada beberapa dekade yang lalu yang banyak di dasari oleh faktor ekonomi, etnis, Agama dan bahasa sehingga muncul dorongan separatis yang sangat besar pada regional tersebut.<sup>3</sup>

Dalam perjalanannya sebagai mediator proses mediasi dilakukan oleh Uni Eropa karena Uni Eropa menganggap bahwa mediasi dianggap sebagai sesuatu yang sangat tepat untuk menjembatani proses dialog dalam penyelesaian konflik daripada dengan menggunakan kekuatan militer, sehingga Uni Eropa lebih mengupayakan proses gencatan senjata dan melakukan perundingan damai serta perjanjian-perjanjian yang mengarah kepada perdamaian.<sup>4</sup>Uni Eropa telah memediasi beberapa konflik yang terjadi dalam permasalahan separatisme yang terjadi baik di lingkungan Eropa maupun di regional lainnya seperti konflik yang terjadi Di Kosovo, Indonesia (Aceh), Pilipina (Mindanao), Georgia dan wilayah

---

<sup>2</sup><https://kbbi.web.id/separatisdiakses> pada Minggu, 15 Oktober 2017 pukul 00.00

<sup>3</sup> Lihat Marvin Suesse, 2016, *Causes and Consequences of Secessionist Movements: Lessons from the Soviet Breakup*, Vives Research Center for regional Economics, Belgium, hal.4

<sup>4</sup> Lihat Peter Brorsen, 2012, *European Institute of Peace costs, benefits and option: Final Report*, SACO (SAFEGE-COWI), Belgium, hal.3

lainnya. proses mediasi tersebut tentu saja melewati langkah dan proses yang berbeda dalam meninjau berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat konflik pada pihak yang bersangkutan. hal tersebut dikarenakan faktor wilayah yang berbeda-beda turut menjadi penentu dalam kesuksesan memahami konflik untuk melakukan pendekatan mediasi.

Sebagai contoh dalam konflik separatis Di Indonesia (aceh) dan Kosovo, dua konflik tersebut merupakan konflik yang sama, hanya saja wilayahnya berbeda. Indonesia (Aceh) terletak di Asia Tenggara atau lebih tepatnya di luar wilayah Eropa sedangkan Kosovo terletak di wilayah Eropa. Dalam konflik separatism di Indonesia (Aceh) pada awalnya CMI sebagai Organisasi Internasional di luar pemerintahan (INGOs) diminta untuk menjadi mediator dalam menangani konflik yang terjadi, sebagai pihak ketiga pada tahun 2004. CMI sebagai pihak swasta yang memediasi konflik ini melakukan perannya dengan baik yang memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia yang tidak ingin menginternasionalisasi masalah internal dalam negerinya<sup>5</sup> kemudian Uni Eropa terlibat secara resmi dengan bekerjasama dengan CMI yang pada awalnya keterlibatan Uni Eropa hanya tentang bantuan kemanusiaan pasca terjadinya bencana tsunami di Aceh. Tahap selanjutnya Uni Eropa mengambil alih konflik tersebut dengan membentuk Aceh Monitoring Mission (AMM) hingga terciptanya perdamaian dengan kata lain keterlibatan Uni Eropa sebagai mediator mengalami kesuksesan pada konflik tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Antje herberg, 2008, *The Brussels 'Backstage' of the Aceh peace process* dalam *Accord: An international review of peace initiatives "Reconfiguring politics: The Indonesia-Aceh Peace Processes"*, No.20, Conciliation Process, London, hal.32  
<sup>6</sup>Tbid, hal. 35

Kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan CMI sebagai pihak ketiga sebagai mediator pada konflik Aceh menandakan bahwa sebagai mediator pihak swasta dan pemerintah resmi dapat bekerja sama pada level tertentu dan saling membutuhkan demi keberhasilan penyelesaian konflik dan menciptakan perdamaian, dan ini terbukti berhasil setelah apa yang terjadi di Indonesia tersebut. Pada permasalahan Kosovo yang notabennya terletak di wilayah Eropa maka pendekatan yang dilakukan oleh Uni Eropa juga berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia karena menyangkut stabilitas yang terletak pada kawasan dan Kosovo merupakan tetangga dari beberapa negara Anggota Uni Eropa.

PBB mengeluarkan Resolusi pada 2010 yang mengizinkan Uni Eropa menjadi mediator dalam permasalahan antara Serbia dan Kosovo untuk menciptakan perdamaian dan menghentikan konflik yang terjadi dengan mengedepankan proses dialog, namun Serbia mempertanyakan bagaimana Kosovo bisa berada didalam pertemuan untuk membahas masalah tersebut, sedangkan Kosovo sendiri tidak memiliki kedaulatan. Hal ini di jawab oleh pihak PBB bahwa ini merupakan persetujuan dari negara-negara besar untuk menyelesaikan konflik dan membuka dialog seperti Jerman, Italia, Perancis dan Amerika Serikat.<sup>7</sup>

Uni Eropa memiliki poin untuk mendesak Serbia agar segera mengakhiri konflik mengingat keinginan Serbia yang ingin bergabung dengan Uni Eropa, namun dalam konflik ini tentunya akan menghambat posisi Serbia dalam mewujudkan hal tersebut karena

---

<sup>7</sup> Lihat General Assembly, 2010, “*Adopting Consensus Resolution, General Assembly Acknowledges World Court Opinion on Kosovo, Welcomes European Union Readiness to Facilitate Process Dialogue*” dalam <http://www.un.org/press/en/2010/ga10980.doc.htm> diakses pada Rabu, 1 November 2017 pukul 13.00

mayoritas negara-negara anggota Uni Eropa mendukung kemerdekaan Kosovo.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa kepentingan dari pihak yang berbeda karena ada keterlibatan Amerika Serikat, sedangkan di pihak Uni Eropa beberapa anggota besarnya juga turut memperakarsai masuknya Kosovo di dalam pertemuan dialog tersebut sehingga permasalahan ini menjadi lebih kompleks untuk di mediasi meskipun pada akhirnya berhasil karena Uni Eropa memiliki kepiawaian dalam menjadi mediator.<sup>9</sup>

Sebagai mediator kepiawaian Uni Eropa tidak di ragukan lagi sebagai pihak ketiga terutama dalam konflik separatisme. Di lingkungan Uni Eropa sendiri tepatnya di Spanyol terdapat permasalahan separatisme yang mengguncang perpolitikan Spanyol. Seperti yang kita ketahui Catalunya ingin memisahkan diri dari Spanyol. Pemisahan diri Catalunya dari Spanyol diakibatkan ketika Mahkamah Konstitusi di Madrid menolak perjanjian otonomi tahun 2006 karena dianggap tidak ada landasan hukum untuk mengakui catalunya sebagai negara di dalam spanyol serta berbagai alasan lainnya mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>10</sup> Sejak saat itu Pemerintah Catalunya berusaha melakukan referendum agar mendapatkan kemerdekaan dari spanyol yang terjadi pada tahun 2014 dan 2017 yang kemudian digagalkan oleh Pemerintah Spanyol dan dianggap ilegal.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Stephan Ozsvath/Anggatira Gollmer, <http://www.dw.com/id/utusan-uni-eropa-diharapkan-mediasi-konflik-kosovo/a-15281640> diakses pada Rabu, 1 November 2017 pukul 10.00

<sup>9</sup> Lihat Andrew Sheriff, 2012, *Glass Half full : Study on EU Lessons learnt in mediation and Dialogue*, hal.15 dalam <http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013-Glass-Half-Full-Study-EU-Lessons-Learnt-Mediation-Dialogue-Key-Messages-Executive-Summary.pdf> diakses pada Rabu, 1 November 2017 pukul 15.00

<sup>10</sup> Pandasurya wijaya, <https://www.merdeka.com/dunia/ini-alasan-mengapa-catalonia-ingin-merdeka-dari-spanyol.html> diakses pada Minggu, 15 Oktober 2017 pukul 00.30

<sup>11</sup> ibid

Berdasarkan penjelasan diatas tentu saja Spanyol ingin mempertahankan Catalunya tetap sebagai bagian dalam kedaulatan Spanyol, sehingga Spanyol akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Catalunya di dalam wilayah Spanyol.

Pemisahan diri Catalunya dari Spanyol menciptakan permasalahan yang meluas dalam Uni Eropa. seperti yang di ketahui Catalunya meminta Uni Eropa sebagai mediator atau penengah konflik yang terjadi antara Spanyol dan Catalunya namun sampai saat ini Uni Eropa memilih untuk tidak ikut campur terhadap apa yang terjadi Di Spanyol karena dianggap sebagai masalah internal dari Negara Spanyol.<sup>12</sup> Jika kita melihat pada permasalahan Kosovo, Uni Eropa menjadi mediator meskipun permasalahan tersebut adalah permasalahan separatism yang di dukung oleh negara Anggota Uni Eropa namun pada permasalahan ini terdapat penolakan dari pihak Uni Eropa dimana rata-rata negara anggota tidak meyetujui atau tidak akan mengakui kemerdekaan Catalunya, Ketua dewan Uni Eropa Donald Tusk mendesak agar Catalunya tidak mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol dan segera mengambil langkah dialog untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Pemerintahan Spanyol agar tidak menimbulkan kerugian bagi Catalunya, Spanyol dan Uni Eropa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Riva Destania Suasta, [https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171005114545-134-246307/catalonia-ancam-deklarasi-kemerdekaan-spanyol-tolak-mediiasi/diakses pada Minggu, 15 Oktober 2017 pukul 01.00](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171005114545-134-246307/catalonia-ancam-deklarasi-kemerdekaan-spanyol-tolak-mediiasi/diakses%20pada%20Minggu,%2015%20Oktober%202017%20pukul%2001.00)

<sup>13</sup> Oscar Jeffrey, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171010221016-134-247538/uni-eropa-desak-pemimpin-catalonia-tak-deklarasikan-merdeka/> diakses pada Minggu, 15 Oktober 2017 pukul 01.20

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, setiap penulis memiliki tujuan utama, begitu pula dalam penelitian ini yang bertujuan untuk :

1. Mengetahui respon Uni Eropa dalam masalah separatisme Di Spanyol (Catalunya)
2. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang di ajukan penulis
3. Sebagai bahan acuan data untuk penelitian terkait mediasi separatisme

## **1.3 Kontribusi Riset**

Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan manfaat baik secara praktis maupun secara akademis yaitu :

### **1.3.1 Praktis**

Dari segi penerapan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi para pembaca terutama para pembuat kebijakan yang dapat digunakan sebagai masukan khususnya dalam permasalahan mediasi separatisme.

### **1.3.2 Akademis**

Hasil penelitian dalam tesis ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman respon kawasan regional, mediasi konflik, dan gerakan separatisme yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan dan sumber data untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan serupa dikalangan akademisi.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka *research question* penelitian ini adalah: Mengapa Uni Eropa menolak permintaan Catalunya sebagai mediator dalam permasalahan separatisme di Spanyol ?

## **1.5 Studi Pustaka**

### **1.5.1 The European Union as a Mediator in Israel and Palestine : Operations Cast lead and Protective Edge oleh Hugh O'Donell, College of Europe**

The European Union as a Mediator in Israel and Palestine : Operation Cast Lead and Protective Edge merupakan jurnal yang ditulis oleh Hugh O'Donell, Jurnal ini bertujuan untuk memeriksa apakah pengenalan EEAS, HR / VP dan '*Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities*' mengubah sumber daya UE sebagai strategi mediator. serta membahas kerjasama dan koordinasi karena keduanya terkait secara terpusat dengan sumber daya dan strategi yang digunakan oleh mediator.. O'Donell menjelaskan bahwa konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik geopolitik yang paling rumit dan kompleks sepanjang sejarah, kita juga membenarkan hal tersebut bahkan sampai saat ini pun konflik Israel dan Palestina terus berlanjut.

Jenis Strategi yang dipilih oleh mediator dipengaruhi oleh sumber mediator tersebut. O'Donell mengatakan bahwa berdasarkan kutipan tersebut Bercovitch mengidentifikasi bahwa tanpa sumber daya, seorang mediator tidak dapat memindahkan para pihak yang berkonflik dan juga tidak dapat mempengaruhi setiap proses tersebut. Bercovitch juga mengidentifikasi tiga hal yang terkait dengan perbedaan konseptualisasi strategi.yang pertama tentang fasilitator yang



memfasilitasi jalannya proses komunikasi, kemudian mengenai procedural yang mana dalam mediator dapat menentukan aspek structural dari pertemuan sebagai contoh yaitu mengenai publikasi media dan pengelolaan penyebaran informasi, yang terakhir adalah strategi direktif, strategi ini yang paling mempengaruhi karena mediator disini berperan mempengaruhi isi dari permasalahan dengan melakukan tawar menawar, memberikan insentif dan mengeluarkan ultimatum.<sup>14</sup>

Dalam studi kasusnya mengenai peran Uni Eropa dalam konflik Israel-Palestina Hugh O'donnell menekankan bahwa strategi procedural yang telah disebutkan di atas hanya untuk Mediator secara langsung yaitu sebagai aktor tunggal dan Co- mediator , sedangkan dalam apa yang di bahas penulis Uni Eropa bukan mediator utama dalam konflik Israel-palestina yang mana Uni Eropa tidak menggunakan strategi tersebut. Uni Eropa tidak menengahi secara langsung dalam sebuah konflik seperti yang terlihat dalam Operation Protective Edge. Namun Uni Eropa memiliki cara tersendiri dalam memainkan peran dalam mediasi yang tertuang dalam '*Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities*'.<sup>15</sup>

Deklarasi venice pada tahun 1980 merupakan awal mula keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Israel-Palestina. Dalam deklarasi tersebut ditetapkan dua prinsip penting, yang pertama orang-orang Palestina harus di tempatkan pada posisi untuk menjalankan sepenuhnya haknya untuk menentukan nasib sendiri dan organisasi pembebasan palestina harus dikaitkan dengan perundingan perdamaian .dua prinsip tersebut secara tidak langsung merupakan solusi perdamaian

---

<sup>14</sup> Hugh O'Donnell, 2016, *The European Union as a Mediator in Israel and Palestine : Operations Cast lead and Protective Edge , EU Diplomacy Paper 01/2016*, College of Europe, Belgium, hal.4

<sup>15</sup> Ibid, hal 5

namun Uni Eropa tidak menjadi mediator secara langsung melainkan mendukung mediator yang ada dalam hal tersebut Amerika menjadi mediator dalam konflik Israel-palestina.

Sebelum perjanjian Lisbon pada tahun 2009 , European Common foreign and Security Policy (CFSP) diwakili oleh tiga aktor yaitu Komisaris untuk Hubungan Eksternal, Perwakilan tinggi CFSP, dan kepresidenan Uni Eropa lalu ketiganya dilebur menjadi satu menjadi High Representative. Kemudian setelah perjanjian Lisbon Uni Eropa membentuk European External Action Service yang didalamnya dibentuk divisi Strategi Pencegahan Konflik, Pembangunan Perdamaian dan Mediasi. Menurut O'Donnell dengan perubahan tersebut dan divisi yang dibentuk berarti ada sesuatu yang lebih jelas dalam mediasi .<sup>16</sup>

Ketika Hamas memenangkan pemilu pada 2006, hal tersebut merupakan sebuah dilematis bagi Uni Eropa dan Amerika serikat karena Hamas termasuk dalam organisasi teroris dan tidak akan mengakui tiga prinsip yaitu, pengakuan terhadap Israel, mengakhiri kekerasan dan menerima kesepakatan yang terjadi sebelumnya. Hal tersebut berujung penolakan melakukan dialog kepada Hamas dan menarik anggaran yang di keluarkan oleh Uni Eropa. Penarikan tersebut menyebabkan turunnya perekonomian palestina dan krisis kemanusiaan.

Setelah sempat di mediasi oleh mesir gencatan senjata terjadi selama enam bulan, namun setelah perjanjian tidak di perbarui kembali terjadi konflik, dalam hal ini Uni Eropa terhambat untuk memainkan peran dalam operation Cast lead pada 2008/2009 yang mana hambatan terjadi karena perubahan kepemimpinan dalam Uni Eropa yang

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 7

mengakibatkan perbedaan kepentingan dalam mengelola konflik. Banyaknya aktor sebelum perjanjian Lisbon juga menjadikan hambatan bagi Uni Eropa dalam mediasi konflik.<sup>17</sup>

Pada Operation Protective Edge 2014 Uni Eropa memulai kembali kemampuan memediasi konflik, menurut O'donnell kali ini tidak ada yang menghambat peran Uni Eropa. Tidak adanya hambatan tersebut setelah di berlakukannya Perjanjian Lisbon pada tahun 2009 Uni Eropa memaksimalkan peran EEAS dalam memainkan peran sebagai aktor tunggal yang mengurus urusan luar negeri. Uni Eropa juga masih merupakan penyandang dana terbesar bagi Palestina pada saat itu. Namun strategi dan sumber daya Uni Eropa belum dapat memainkan peran maksimal dalam mediasi tersebut.

Menurut O'Donnell kebijakan memutus kontak dengan Hamas menjadi faktor yang menghambat peran Uni Eropa sehingga Uni Eropa harus merubah hal tersebut dan memainkan peran yang lebih besar meskipun diakui bahwa Uni Eropa memiliki peran yang besar dalam mediasi konflik antara Israel dan Palestina.<sup>18</sup> Selanjutnya, Uni Eropa harus mengatasi kurangnya kemauan politik untuk bertindak., Uni Eropa memiliki kapasitas namun seringkali tidak memiliki kemauan politik untuk menggunakannya.

### **1.5.2 Why is Peace in Aceh Successful? Oleh Hamid Awaluddin, Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia**

Tulisan Hamid Awaluddin yang berjudul Why is peace in Aceh Successful? bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan mediator dan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Aceh antara

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 14

<sup>18</sup> Ibid, hal 22

Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hamid Awaluddin sendiri merupakan salah satu perwakilan Indonesia sebagai mediator yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Aceh yang mana pada saat itu Hamid menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan perdamaian pada konflik Aceh, mulai dari mediator, faktor wilayah dan bencana alam serta komitmen yang matang dari pihak yang bertikai.

Setelah terjadi kesepakatan damai di Helsinki pada 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah mulai memainkan peran demi terwujudnya kesepakatan damai tersebut dimana sebagai bagian dari negosiasi Pemerintah Indonesia mulai membebaskan tahanan dari pihak GAM. Bersamaan dengan kebebasan para tahanan GAM, Pemerintah memberikan Otonomi Khusus kepada Aceh, dimana dengan otonomi khusus ini yang paling terlihat adalah dari segi program ekonomi dengan memberikan izin untuk menyimpan 70% dari pendapatan Aceh. Pendapatan tersebut diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi Aceh, karena seperti yang diketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya konflik berdarah di Aceh.<sup>19</sup>

Pada saat yang bersamaan Hamid menjelaskan bahwa bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, membuat Pemerintah dan GAM lebih mementingkan aksi kemanusiaan daripada saling menekan pelatuk satu sama lain disini lah kesuksesan perdamaian di Aceh di mulai. Bencana tsunami juga mulai dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendapatkan support

---

<sup>19</sup> Hamid Awaluddin, 2008, Why is Peace in Aceh Successful? dalam *Accord: An international review of peace initiatives "Reconfiguring politics: The Indonesia-Aceh Peace Processes"*, No.20, Conciliation Process, London, hal.25

internasional yang kemudian memediasi konflik, pada saat itu turut hadir perwakilan dari berbagai negara di Eropa yang mana salah satu negara tersebut merupakan tempat pemimpin GAM bermukim yaitu Swedia kemudian Wakil Presiden pada saat itu mengutarakan bahwa akan menjadi sia-sia aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut jika tidak mendukung proses perdamaian yang terjadi di Aceh, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak di culik dan keamanan manusia yang lain serta untuk mengadakan pembangunan demi berjalannya kehidupan dimasa mendatang tidak akan terpenuhi jika konflik terus berjalan. Hamid mengatakan bah taktik yang dijalankan oleh Jusuf Kalla ini berjalan dengan sangat baik.<sup>20</sup>

Pemimpin dari mediator yang di minta oleh Indonesia pada saat itu Martti Ahtisaari menekankan kepada kedua belah pihak yang bertikai bahwa kedua belah pihak yang bertikai dilarang keras mendiskusikan apapun selain apa yang telah di agendakan oleh mediator yang mana pada saat itu hanya otonomi khususlah yang merupakan agenda yang boleh ditunggangi oleh kedua belah pihak. Hamid juga mengatakan bahwa mediator pada saat itu telah melakukan hal yang sangat tepat ketika bertemu dan ingin menjalankan kesepakatan damai. Marthi menekankan pula bahwa jika kedua belah pihak ingin mendiskusikan selain yang di tetapkan maka itu membuang-buang waktu dan mempersilahkan mereka pergi dari ruangnya karena pihak yang bertikai meminta beliau untuk menjadi mediator yang otomatis harus sesua dengan apa yang di rencanakannya.

Satu poin yang di tekankan Marthi kepada pihak GAM adalah dengan penekanan bahwa jika mereka ingin membicarakan kemerdekaan maka hal itu tidak akan mereka dapatkan karena segala

---

<sup>20</sup> Ibid, hal.26

kemampuannya akan di kerahkan untuk mempengaruhi Eropa untuk tidak mendukung GAM dan GAM dijamin tidak akan memperoleh kemerdekaannya. Yang dibicarakan hanya akan mengarah kepada perdamaian dan sesuai yang di Agendakan. Yang terakhir adalah agar selama proses mediasi maka kedua belah pihak agar menutup mulut terhadap apa yang telah didiskusikan kepada pihak luar termasuk media agar tidak terjadi kegagalan dalam mediasi yang telah di upayakan.<sup>21</sup>Pernyataan tersebut merupakan faktor kunci tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bertikai.

### **1.5.3 Georgia's Conflict :What Role for the EU as Mediator oleh Magdalena Frichova Grono, Fletcher School of Law and Diplomacy**

Georgia's conflict : What Role for the EU as Mediator merupakan jurnal yang ditulis oleh Magdalena Frichova Grono, jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan peran yang di ambil oleh Uni Eropa sebagai mediator dalam konflik Georgia. Konflik Georgia terjadi dalam tiga tingkat yang berbeda, Lokal, Regional dan Geopolitik.Pertimbangan politis dan keamanan dalam konflik tersebut berdampak pada strategi resolusi konflik dan jenis resolusi yang sedang diupayakan.Dalam wilayah Georgia terdapat dua wilayah yang ingin memisahkan diri dari Georgia yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia.<sup>22</sup>

Menurut Magdalena kedua wilayah tersebut didukung oleh Rusia sehingga menimbulkan konflik yang terjadi antara Georgia dan Rusia pada tahun 2008, konflik tersebut jauh lebih dalam setelah intervensi Rusia dalam wilayah Separatis Georgia yang menyebabkan

---

<sup>21</sup> Ibid, hal.27

<sup>22</sup> Magdalena Frichova Grono, 2010, Georgia's Conflict: What Role for The EU as Mediator, IFP Mediation Cluster, EU, hal 9

hubungan dengan tensi tinggi serta kekerasan antara kedua negara tersebut, di tambah lagi Georgia yang mendaftarkan diri untuk terintegrasi dengan Nato dan Uni Eropa yang menjadi salah satu faktor Rusia mendukung kedua wilayah tersebut Untuk memisahkan diri. Pendekatan Integrasi tersebut didukung oleh Nato yang berencana memasukkan Georgia dan Ukraina sebagai anggotanya yang mana hal ini membuat Rusia sangat marah, tidak hanya itu Pengakuan negara barat terhadap kemerdekaan Kosovo juga menjadi salah satu faktor tersebut yang mana Rusia memprotes keras pengakuan tersebut.<sup>23</sup>

Uni Eropa memainkan Peran dalam konflik tersebut dengan menjadi mediator, salah satu yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam konflik tersebut adalah pengembangan daerah konflik dan program pengembangan kepercayaan, termasuk dukungan terhadap inisiatif transformasi konflik tingkat kedua dan ketiga. Peran Uni Eropa sebagai mediator saat itu dipimpin oleh Nicolas Sarkozy selaku Presiden Perancis pada saat itu yang mana Sarkozy mengupayakan gencatan senjata yang terjadi pada wilayah konflik tersebut atas nama Uni Eropa untuk mengedepankan perdamaian. Terdapat enam poin kesepakatan yang di ajukan pada saat itu yaitu penekananan untuk tidak menggunakan kekuatan, menghentikan permusuhan selamanya, memberikan akses yang tidak terbatas untuk bantuan kemanusiaan, Pasukan Georgia harus menarik diri ke dalam posisi mereka, Pasukan Rusia harus kembali keposisi mereka sebelum terjadinya permusuhan dan memantau perdamaian internasional yang dibantu pasukan perdamaian Rusia untuk keamanan tambahan, dan yang terakhir

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 11

mengadakan diskusi internasional untuk menciptakan kestabilan dan keamanan pada wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan.<sup>24</sup>

Pencapaian Sarkozy dalam resolusi konflik tersebut menemui titik terang ketika pihak yang bertikai menandatangani kesepakatan tersebut dan Rusia menarik pasukannya dari Georgia namun yang menjadi dilematis adalah Rusia tidak mundur ke posisi sebelum terjadinya konflik. Beberapa pengamat menilai Sarkozy tidak dalam Uni Eropa ketika menangani konflik, dia seperti sedang memimpin Perancis dan membangun hubungan dengan Moskow secara pribadi namun Pemimpin Georgia masih percaya bahwa Sarkozy sebagai penjamin gencatan senjata tersebut. Uni Eropa membangun kerjasama dengan negara di bagian timur untuk meningkatkan dukungan politik. Beberapa pejabat menganggap cara ini dapat melawan pengaruh Rusia di wilayah tersebut. Secara tidak langsung Uni Eropa mendukung integrasi Georgia.<sup>25</sup>

Kekuatan Uni Eropa berada dalam peran dan mandat yang berbeda-beda meskipun Uni Eropa tidak dapat selalu memanfaatkan hal ini dalam menjadi mediator, negosiasi dan mediasi, selama ini kurang terkoordinasi secara strategis. Posisi dan kepentingan Uni Eropa berhadapan dengan satu konflik terkadang menghambat usaha dalam menangani tingkat konflik lainnya. Dalam tulisan Magdalena ini peran Uni Eropa pada tahun 2008 belum diluncurkan konsep mediasi oleh Uni Eropa dan belum berlakunya perjanjian Lisbon pada 2009 sehingga aktor dalam memediasi bervariasi dan sesuai kepentingannya meskipun dibawah naungan Uni Eropa.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 12

<sup>25</sup> Ibid, hal 20



#### **1.5.4 Perbedaan tesis ini dengan penelitian Sebelumnya**

Perbedaan tesis ini dengan penelitian sebelumnya adalah tesis ini membahas tentang penolakan Uni Eropa sebagai Mediator dalam pemisahan diri Catalunya dari Spanyol. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang keterlibatan Uni Eropa dalam memainkan peran mengedepankan perdamaian pada setiap konflik dengan menjadi pihak ketiga baik terlibat secara langsung maupun tidak serta dinamika Resolusi konflik dimana Uni Eropa menjadikan Mediasi sebagai salah satu kebijakan untuk mencegah konflik dan memelihara perdamaian. Peran Uni Eropa untuk terlibat dalam sebuah konflik pada penelitian sebelumnya bervariasi berdasarkan dalam menempatkan posisi, meskipun Uni Eropa berusaha secara maksimal menempatkan diri dalam setiap konflik perdamaian namun belum terdapat penelitian serupa yang membahas alasan di tolaknya sebuah permintaan mediasi.

Dalam tesis ini akan dibahas tentang Uni Eropa yang biasanya sebagai mediator perdamaian ketika konflik sedang terjadi pada anggota Uni Eropa untuk menciptakan kestabilan politik, ekonomi dan keamanan bagi para anggota Uni Eropa namun dalam konflik Catalunya dan pemerintah Spanyol Uni Eropa menolak menjadi mediator dalam konflik tersebut disertai analisa yang mendalam terkait permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan data lain yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Variasi data ini membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Peneliti/Judul	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hugh O'Donell/ The European Union as a Mediator in Israel and Palestine : Operations Cast lead and Protective Edge	memeriksa apakah pengenalan EEAS, HR / VP dan ' <i>Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities</i> ' mengubah sumber daya UE sebagai strategi mediator	Deskriptif Analitik	Uni Eropa dapat berperan penting dalam menciptakan perdamaian dan kestabilan pada konflik-Israel dan Palestina namun penolakan dan memutuskan hubungan dengan hamas menjadi hambatan bagi Uni Eropa dalam memediasi konflik sehingga Uni Eropa harus merubah arah kebijakannya demi kelancaran mediasi konflik.
2	Hamid Awaluddin/Why is Peace in Aceh Successful?	menjelaskan keberhasilan mediator dan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Aceh antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)	Deskriptif	Sikap tegas Mediator konflik Indonesia-Aceh yang menekankan bahwa seluruh pihak yang bertikai wajib mengikuti kesepakatan yang telah direncanakan oleh mediator tanpa membahas kepentingannya masing-masing menjadi salah satu faktor suksesnya mediasi dan Dialog yang didukung oleh bencana alam yang membangkitkan kesadaran dari kedua pihak yang bertikai untuk mengedepankan aksi kemanusiaan

3	Magdalena Frichova Grono/ Georgia's Conflict :What Role for the EU as Mediator	menjelaskan peran yang di ambil oleh Uni Eropa sebagai mediator dalam konflik Georgia.	Deskriptif Analitik	Uni Eropa memainkan peran penting dalam konflik Georgia-Rusia, meskipun dalam posisi yang dilematis setelah terjadinya kesepakatan Uni Eropa tetap mencari jalan lain untuk menghambat posisi Rusia di dalam konflik tersebut namun tidak adanya sinkronisasi dan banyaknya aktor dalam mediasi dibawah Uni Eropa membuat hal tersebut sebagai hambatan sebelum munculnya aktor yang memainkan peran lebih spesifik dalam memediasi konflik pasca Perjanjian Lisbon
4	Azzam/ Penolakan Uni Eropa Sebagai Mediator dalam masalah Separatisme di Spanyol ( studi kasus : Catalunya)	Mengetahui respon Uni Eropa dalam mengatasi masalah separatisme Di Spanyol (Catalunya), Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang di ajukan penulis, Sebagai bahan acuan data untuk penelitian terkait separatisme	Deskriptif Analitik	Penolakan Uni Eropa menjadi pihak ketiga dalam permasalahan separatisme dikarenakan Memediasi konflik atas permintaan Catalunya dapat mengancam Integritas politik, Ekonomi, Keamanan dan kawasan.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 *Intergovernmentalist Approach*

Dalam perkembangan Hubungan Internasional membangun sebuah kerjasama dengan membentuk sebuah Integrasi untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, dewasa ini menjadi salah satu faktor penting yang mengarah pada wujud perdamaian. Hal tersebut biasanya didasari oleh asas kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk mencapai tujuan tertentu secara kolektif tanpa mengesampingkan kepentingan domestik negara tersebut. Bersama-sama tentang hal tersebut maka menjadi penting dengan menghadirkan sebuah institusi antar negara yang mampu menjadi wadah untuk menampung segala kepentingan kolektif yang memiliki efek terhadap perkembangan negara anggotanya. Dalam penelitian ini Uni Eropa dapat dipandang menjadi sebuah model institusi organisasional antar negara yang menjadi tempat berkumpulnya pemilik kepentingan dimana kemudian berangkat hingga sampai pada tujuan yang ditentukan bersama.

*Intergovernmentalis Approach* merupakan sebuah pendekatan klasik yang melemparkan kritik terhadap Neo-functionalism mengenai integrasi Uni Eropa yang pertama di gagas oleh Stanley Hoffmann. Menurut penulis pendekatan tersebut dapat menggambarkan dan menjawab fenomena yang dibahas dalam penelitian ini yaitu ketika permintaan Catalunya untuk memediasi konflik yang terjadi dengan Pemerintah Spanyol namun permintaan tersebut ditolak oleh Uni Eropa. Pendekatan tersebut berangkat dari pandangan realis bahwa Politik internasional merupakan interaksi dari kepentingan Individu sebuah negara dalam lingkungan yang anarki dimana tidak ada otoritas

global yang menjamin ketertiban. Hampir sama seperti Realis, Neo-Realis yang melihat negara sebagai aktor mandiri yang ada dalam system anarki namun menyadari adanya potensi ketertiban jika membangun kerjasama internasional. Menurut Hoffman *Intergovernmentalism approach* asumsi dasarnya adalah dalam integrasi Uni Eropa yang menjadi aktor utamanya adalah pemerintah dari negara anggota. Kemudian Integrasi Uni Eropa tidak dapat diproses pada level yang sangat minim karena terdapat keterbatasan kebijakan yang menyentuh kedaulatan negara apalagi jika Institusi menggoyang isu-isu fundamental yang terletak pada negara tersebut.<sup>26</sup> dengan kata lain bahwa kedaulatan menjadi kepentingan utama negara yang patut dihargai dan menganggap isu-isu domestic sebagai bagian internal dari negara tersebut jika negara tersebut tidak ingin berbagi kedaulatan maupun permasalahan yang menyangkut kepentingan negara.

Dalam Simon Hix asumsi lain mengenai *Intergoernmental Approach* bahwa negara hanya menyetujui output yang terjadi ditingkat Eropa jika hasil tersebut mempromosikan pilihan mereka. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada alasan kolektif yang baik dimana negara akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada institusi yang mana hal tersebut menegaskan bahwa Integrasi Eropa di didorong oleh kepentingan dan tindakan negara bangsa.<sup>27</sup> Berdasarkan pandangan dan asumsi diatas maka fungsi Uni Eropa disini adalah menjadi sarana untuk bertemu dan mengumpulkan negara anggota sebelum berangkat menuju tujuan bersama akan tetapi peran negara berada satu tingkat

---

<sup>26</sup>Michelle Cini & nieves Perez-Solorzano Borrigan, 2010, *European Union Politics*, Oxford UNiversity Press, New York, hal. 88

<sup>27</sup> Simon Hix,

diatas Uni Eropa karena jika tidak ada negara yang mendorong kepentingan mereka maka tidak akan terbentuk integrasi Uni Eropa.

*Intergovernmentalist Approach* tidak hanya berlaku dalam Uni Eropa namun juga dapat diterapkan pada seluruh organisasi internasional antar pemerintah yang dapat mengarah pada proses pembuatan kebijakan, sehingga *Intergovernmentalist* dapat menghitung untung dan rugi dalam integrasi Uni Eropa.<sup>28</sup> berdasarkan penjelasan tersebut dalam proses pembuatan kebijakan baik negara maupun institusi harus memperhitungkan untung dan rugi output dari kebijakan tersebut, jika Sebuah negara membuat kebijakan yang dirasa menguntungkan namun merugikan seluruh anggota institusi berarti secara tidak langsung hal itu nantinya kerugian tersebut akan berimbas kepada negara tersebut karena belum tentu keputusan tersebut sebagai pandangan kolektif yang menuntun kepada kepentingan bersama. Namun jika Sebaliknya Institusi merasa untung atau setidaknya tidak dirugikan atas keputusan yang dibuat maka negara berhak menentukan kebijakan mereka sendiri sesuai dengan domestic policy mereka jika merasa keputusan tersebut merugikan mereka.

Dalam penelitian ini Sikap Uni Eropa menolak permintaan Catalunya bisa di jelaskan dari *Intergovernmentalist Approach*. Yang pertama proses pembuatan kebijakan Uni Eropa sebagai institusi organisasional harus didasari dan mengutamakan kepentingan nasional negara anggota karena menyangkut kedaulatan dan integrasi wilayah negara tersebut termasuk dalam konstitusi yang ditetapkan negara tersebut. Uni Eropa harus memperhatikan kepentingan domestik negara tersebut, dalam hal ini Spanyol yang merupakan negara anggota,

---

<sup>28</sup> Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borrigan, *ibid*

sebagai institusi organisasional antar negara peran Uni Eropa penting dalam menentukan kebijakannya, karena anarkki dapat muncul ketika tidak ada organisasi yang menjamin ketertiban sehingga aspek ini harus menjadi alarm ketika Uni Eropa ingin muncul untuk memediasi.

Untuk memediasi konflik Uni Eropa harus menghitung keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari kaca mata Uni Eropa yang bukan lagi menyangkut masalah integrasi dari berbagai aspek pada lini negara meskipun namun pada integrasi yang terletak dalam Uni Eropa itu sendiri. Maka dari itu pada proses pengambilan keputusan kepentingan negara anggota harus didahulukan karena jika kepentingan negara terpenuhi akan membawa kepada jalur integrasi kawasan yang lebih baik, yang mana integrasi kawasan juga merupakan bagian dari kepentingan domestik negara tersebut. hal ini jelas dan dapat ditegaskan bahwa sebuah negara tidak akan berintegrasi kecuali mereka bersama-sama memprioritaskan keuntungan bagi negaranya maka menjadi jelas bahwa negara sebagai aktor yang mendorong integrasi Uni Eropa dengan hubungan timbale balik Uni Eropa memprioritaskan kepentingan negara anggotanya.

## **1.7 Hipotesa**

Hipotesa yang dapat dikemukakan pada tesis ini adalah: Uni Eropa menolak permintaan Catalunya sebagai mediator dalam pemisahan diri dari Spanyol karena pemisahan diri tersebut menciptakan ancaman integrasi Politik, ekonomi dan keamanan serta kawasan.

## **1.8 . Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik yang berusaha untuk memberikan gambaran atau mendiskripsikan keadaan obyek serta permasalahan dengan menggunakan analisa data dan dalam penelitian ini peneliti akan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian secara obyektif.<sup>29</sup>

### **1.8.2. Jenis Data Penelitian**

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua. Dalam tesis ini, data primer adalah hasil wawancara dengan berbagai subjek penelitian dan juga hasil analisis isi yang dilakukan peneliti pada respon Uni Eropa terkait separatism Sedangkan data sekunder adalah literatur yang menunjang tesis seperti, data histori, sirkulasi dan buku acuan mengenai gerakan separatism dan penanganannya.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan data**

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- 1.8.3.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui Interview dandiskusi mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan diskusi dan interview kepada Delegasi Uni Eropa di Jakarta dengan Mr. Charles-Michel Geurts, Wakil kepala Delegasi Uni Eropa

---

<sup>29</sup>Lexy J, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya.1998) hal.6.



untuk Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai narasumber

1.8.3.2 Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui: Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait penelitian, kemudian Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dapat berbentuk arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

#### **1.8.4 Batasan Penelitian**

Demi mempersempit pembahasan dan mereduksi pengembangan penelitian yang tidak maksimal, maka peneliti menerapkan batasan bagi penelitian ini, yaitu permasalahan Separatisme di Spanyol (Catalunya) yang terjadi 2017

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**Bab I** : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Dalam bab ini, penulis akan mengulas tentang dinamika mediasi internasional Uni Eropa, dimulai dari sejarah integrasi Uni Eropa hingga mediasi sebagai salah satu alat kebijakan serta implementasi mediasi konflik yang dilakukan Uni Eropa.

**Bab III** : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dinamika politik disintegrasi di Spanyol. Dimulai dari kompleksitas sejarah integrasi wilayah Spanyol hingga munculnya fenomena disintegrasi beberapa wilayah Spanyol yang terkait dengan Sejarah integrasi tersebut.

**Bab IV** : Dalam bab ini penulis memaparkan dan menganalisa data serta hasil wawancara yang menjelaskan faktor-faktor penyebab penolakan Uni Eropa sebagai Mediator dalam permasalahan separatistis Di Spanyol (Catalunya)

**Bab V** : Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

